



STRATEGI PENGETAHUAN DIGITAL 'LOCAL CONTENT' UNTUK PENGEMBANGAN KONTEN REPOSITORI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

STRATEGY OF DIGITAL KNOWLEDGE 'LOCAL CONTENT' FOR REPOSITORY CONTENT DEVELOPMENT IN MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE'S REPUBLIC OF INDONESIA

Oleh:

Wahid Nasihuddin
Chaidin Amir

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
wahed87@gmail.com

[DOI: 10.17509/edulib.v9i1.15597](https://doi.org/10.17509/edulib.v9i1.15597)

Abstract

This study aims to describe and to know: (a) the management of institution repository; (b) the development efforts of the institutional repository contents and systems; (c) the knowledge product of institution local content; and (d) the management strategies of the knowledge product of local content through institution repository. The type of study data is qualitative, with the data sources are document studies and observations. The data were analyzed descriptively. The study results indicated that: (1) the management of the Ministry of Education and Culture's repository referred to the duties and functions of the Special Library of Government Agency that aims to integrate of the services and collections digital local content of library; (2) the digital collection of local content repository institutions is relatively large and can be utilized optimally even though the repository system is still being developed; (3) the knowledge products of local content of in Ministry of Education and Culture's repository such as of policy documents (guidelines, manuals, operational guidelines, technical guidelines), study results, training materials, training participants' learning outcomes, research results, and journals; (4) the library of Ministry of Education and Culture needs to establish the repository system and content development strategies, start from the policy strategies of system development to the knowledge products of digital local content in instituon repository.

Keywords : Knowledge Product, Digital Collection, Local Content; Institutional Repository, Special Library, Ministry of Education and Culture's Library

Article Info

Naskah Diterima :
2019-02-21

Naskah Direvisi:
2019-04-23

Naskah Disetujui:
2019-05-13

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui: (a) pengelolaan repositori lembaga; (b) upaya pengembangan konten dan sistem repositori lembaga; (c) produk pengetahuan local content lembaga; dan (d) strategi pengelolaan produk pengetahuan local content melalui repositori lembaga Kemendikbud. Jenis data kajian adalah kualitatif, dengan sumber data studi dokumen dan observasi. Data kajian dianalisis secara deskriptif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan repositori lembaga Kemendikbud mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan dan koleksi perpustakaan digital local content; (2) koleksi digital local content repositori lembaga jumlahnya relatif banyak dan sudah dapat dimanfaatkan secara optimal meskipun sistem repositori masih

terus dikembangkan; (3) produk pengetahuan local content repositori lembaga Kemendikbud berupa dokumen kebijakan Kemendikbud (pedoman, panduan, juklak, juknis), hasil kajian, materi diklat, hasil belajar peserta diklat, hasil penelitian, dan jurnal; (4) Perpustakaan Kemendikbud perlu menetapkan strategi dalam pengembangan sistem dan konten repositori, mulai dari strategi kebijakan pengembangan sistem hingga ke pengembangan produk pengetahuan digital local content repositori lembaga.

Kata kunci: Produk Pengetahuan, Koleksi Digital, Muatan Lokal, Repositori Lembaga, Perpustakaan Khusus, Kemendikbud

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan telah menjelma dari perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan digital, dan berkembang lagi menjadi repositori lembaga. Mukhlis (2017) mengatakan bahwa perpustakaan digital dikembangkan dengan cara-cara baru yang berhubungan dengan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk koleksi noncetak, yang dikelola perpustakaan dengan cara memelihara, mengumpulkan, mengorganisasikan, penyebaran dan tersedia akses oleh pengguna. Melalui pengembangan perpustakaan digital memungkinkan koleksi yang statis menjadi aset, dan akhirnya menjadi modal pengetahuan.

Produk pengetahuan ini dapat dihasilkan oleh lembaga atau perpustakaan melalui kegiatan knowledge sharing, diskusi, seminar, ataupun publikasi. Materska (2004) mengatakan hal terpenting dalam memproduksi pengetahuan adalah kemampuan dalam proses menemukan, menyintesis, berkomunikasi, menerapkan pengetahuan, dan menghasilkan inovasi. Di Perpustakaan misalnya pustakawan dapat menghasilkan pengetahuan berupa makalah/artikel jurnal dan prosiding, artikel populer, koleksi monograf, profil penelitian, dan bahan presentasi. Dalam penelitian, pustakawan dapat berperan sebagai kolaborator riset peneliti atau sivitas

akademika. Pustakawan membantu pengumpulan data, analisis data, diseminasi hasil penelitian, dan mengemas ulang hasil penelitian menjadi produk pengetahuan baru, seperti dokumen kebijakan, buku pedoman, peraturan lembaga, bahan pengajaran dan pendidikan, laporan tahunan, baik dalam bentuk tercetak maupun digital.

Implementasi repositori ini merupakan bagian dari usaha untuk meneguhkan kembali kegiatan komunikasi ilmiah dengan cara-cara yang lebih mudah dan cepat berbasis teknologi informasi (web). Repositori berfungsi sebagai pengendali dan menjadi indikator pertumbuhan karya-karya ilmiah dan dinamika kegiatan-kegiatan penelitian yang diselenggarakan lembaga, khususnya di perguruan tinggi/universitas. Repositori merupakan media online yang ditujukan untuk menghimpun, melestarikan, dan menyebarluaskan produk intelektual lembaga dalam bentuk digital (Arianto; Zulaikha; Marwiyah; & Zain, 2017). Apabila karya dan publikasi intelektual itu dihasilkan oleh sivitas lembaga sendiri maka karya tersebut disebut sebagai koleksi local content (muatan lokal).

Terkait dengan pengembangan produk pengetahuan, pengelolaan koleksi digital lembaga, dan pelayanan informasinya melalui perpustakaan digital, Perpustakaan Kementerian

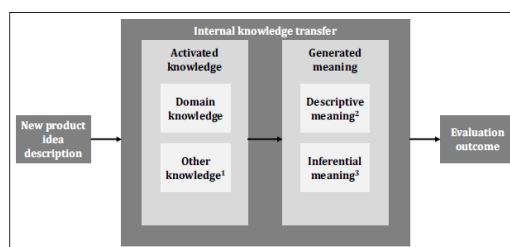
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Perpustakaan Kemendikbud) telah menyiapkan berbagai perangkat kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi yang dilayankan melalui sistem repositori. Perpustakaan perlu membuat konsep kebijakan yang jelas dan tertulis dalam pembangunan perpustakaan digital, karena perpustakaan digital secara strategis memungkinkan koleksi yang statis menjadi aset dan akhirnya menjadi modal pengetahuan (Nurkamilah, 2012).

Dokumen kebijakan tersebut sebagai langkah awal lembaga menguatkan peran pustakawan dalam pendokumentasi pengetahuan lembaga melalui sistem repositori. Kebutuhan tenaga perpustakaan ini disesuaikan dengan beban kerja atau tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing satuan kerja di Kemendikbud (Saputro & Amir, 2018).

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Produk Pengetahuan

Pada level masyarakat, keberhasilan suatu pengetahuan dapat dilihat dari berbagai indikator, diantaranya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup yang didorong oleh produksi pengetahuan baru, baik dalam bentuk teknologi (hak cipta, paten), modal manusia (populasi yang terdidik dan kreatif), maupun program komputer dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dinamis (Khan, 2005). Untuk memproduksi pengetahuan, Denker (2018) mengatakan bahwa lembaga harus menetapkan domain pengetahuan (knowledge domain), yakni pengetahuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pengguna, peluang, dan keterbatasan teknologi terapan dalam suatu domain.



Gambar 1

Alur Transfer Pengetahuan Berbasis Domain Pengetahuan (Denker, 2018)

Kegiatan menghasilkan pengetahuan merupakan rangkaian dari implementasi konsep manajemen pengetahuan (knowledge management). Dalam menghasilkan pengetahuan, lembaga atau organisasi agar dapat tetap bersaing, organisasi harus secara efisien dan efektif menciptakan, melokasikan dan menangkap serta membagi pengetahuan dan keahliannya untuk

mengaplikasikan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah dan mengeksploitasi peluang. Sebagai contoh adanya perubahan tacit ke explicit knowledge—jika perusahaan ingin menerapkan penggunaan mesin-mesin baru dalam proses produksi maka perusahaan mengirimkan wakilnya untuk belajar mesin tersebut. Hal yang mungkin dilakukan pertama kali adalah mengamati, mengobservasi,

serta mempraktekan mesin tersebut selama pelatihan (Aldi, 2005). Produk pengetahuan yang dihasilkan oleh sivitas lembaga sendiri dan dilayankan di perpustakaan dapat disebut sebagai koleksi local content. Prinsip penyimpanan koleksi local content yaitu kualitas konten, akses informasi, dan keberlanjutan. Beberapa pengetahuan tambahan untuk pustakawan dalam pengelolaan koleksi local content, diantaranya pengetahuan tentang perencanaan strategis, memahami isu-isu digitasi, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya (Mafar, 2012).

2. Koleksi Digital *Local Content*

Informasi koleksi local content sifatnya unik dan hanya dihasilkan dan dimiliki oleh institusi penghasil informasi, dan biasanya tersimpan dalam perpustakaan sebagai lembaga deposit yang mempunyai kewenangan untuk menyimpan, mengorganisasikan dan mendistribusikan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pemustaka (Sutedjo, 2014).

Saat ini, pengembangan koleksi local content sudah dalam bentuk koleksi digital. Koleksi digital local content ini merupakan aset koleksi yang dikelola oleh lembaga atau perpustakaan dalam bentuk digital atau elektronik yang dapat diakses secara online. Koleksi digital perpustakaan tersaji dalam dua bentuk, yaitu koleksi yang lahir dalam format digital (born digital); dan koleksi hasil alihmedia, dari bentuk analog ke bentuk digital (Nashihuddin, 2009). Ada beberapa

alasan perpustakaan lebih memilih mengelola dan mengembangkan koleksi digital local content dari pada koleksi tercetak, diantaranya: (a) koleksi local content dapat meningkatkan reputasi dan peringkat universitas/lembaga dan mempertahankan keberlangsungan akses jangka panjang koleksi; (b) diseminasi koleksi local content dapat menjangkau pembaca dan masyarakat yang lebih luas dan melampaui kemampuan akses sumber-sumber informasi tercetak; (c) penyediaan koleksi digital local content dapat meningkatkan visibilitas dan reputasi penulis (Ezema, 2013).

3. Repositori Lembaga

Repositori lembaga bermanfaat dalam pengumpulan karya ilmiah dalam suatu tempat agar dapat ditemukan kembali secara mudah dengan mesin pencari seperti Google dan database penelusuran lainnya. Fungsi repositori selain tempat penyimpanan informasi/koleksi adalah sebagai sarana promosi, menyebarkanluaskan karya sivitas akademika dalam tempat dan waktu yang tidak terbatas. Dalam pembangunan repositori lembaga diperlukan suatu proses yang dimulai dari benchmarking, menyiapkan sumberdaya, dukungan pimpinan, prosedur dan peraturan, perangkat keras dan lunak serta jaringan, dan manajemen untuk menangani informasi local content (Sutedjo, 2014).

Ada beberapa indikator kesuksesan dalam pembangunan repositori lembaga, yaitu: (1) persentase penulis yang mengarsipkan

karyanya dalam sistem repositori; (2) jumlah koleksi per-penulis; (3) jumlah komunitas yang mengarsipkan karyanya dalam sistem repositori; (4) jumlah unduhan konten per-hari/bulan/tahun; (5) jumlah dokumen yang diarsipkan per-hari/bulan/tahun; (6) ketersediaan teks lengkap dokumen; dan (7) nilai tambah layanan (Cassella, 2010).

Agar implementasi konsep repositori dapat berjalan secara efektif dan mencapai kualitas terbaik, Yaniasih (2015) mengatakan lembaga harus merumuskan dan menetapkan kebijakan wajib deposit teks lengkap karya ilmiah dan kebijakan akses untuk semua kalangan dan disertai batasan-batasannya. Kebijakan ini didukung dengan: (a) konsep web yang memiliki fasilitas deposit untuk swaarsip peneliti secara mudah, cepat dan tepat; (b) fasilitas pencarian yang memudahkan pengguna mendapatkan informasi dengan tepat; dan (c) fitur pendukung yang memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kualitas publikasi peneliti, repositori, dan lembaga induk. Hal yang sama dikatakan Jones (2007), bahwa dalam pembangunan repositori, lembaga perlu mengidentifikasi beberapa hal, yaitu bagaimana: memperoleh konten, kebijakan dan strateginya, serta perencanaan untuk melestarikan konten dan apa yang sudah dilakukan. Hal tersebut perlu diidentifikasi oleh para pemangku kepentingan untuk menetapkan dan mengevaluasi sistem manajemen, strategi, kebijakan, dan anggaran. Berikut ini ada empat aspek yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan ketika membangun dan mengembangkan repositori lembaga, yaitu: (a) pelanggan dan pemangku kepentingan eksternal—repositori

memberikan kontribusi langsung untuk pemenuhan kebutuhan informasi pengguna dan peningkatan reputasi lembaga; (b) inovasi dan pengembangan—repositori memberikan kontribusi terhadap keluaran karya intelektual dan inovasi dari organisasi; (c) proses bisnis internal—repositori memberikan kontribusi terhadap cara organisasi bekerja atau memndukung suasana kerja yang lebih baik; dan (d) pendanaan—repositori memberikan kontribusi dalam hal investasi atau menghasilkan pendapatan.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data penelitian bersumber dari studi literatur dan observasi penulis. Data studi literatur berupa dokumen kebijakan pengembangan perpustakaan digital dan repositori lembaga (Kemendikbud, 2016), laporan rancangan proyek perubahan pembangunan repositori lembaga Kemendikbud (Amir, 2016), dan laporan/data pemanfaatan konten dan layanan repositori lembaga di portal repositori lembaga.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Repositori Lembaga Kemendikbud

Sistem repositori Kemendikbud dibangun dengan platform atau aplikasi open source Eprints (<http://www.eprints.org/>). Layanan EPrints adalah mempromosikan pemanfaatan platform repositori terkemuka di dunia dan penyediaan dana (bukan lembaga profit) untuk menjamin keberlanjutan akses

informasi dan pengembangan aplikasi repositori di masa depan. Gambar 2 dan Gambar 3 merupakan tampilan database Repositori Lembaga Kemendikbud.



Gambar 2
Database Repositori Kemendikbud RI (Lama)



Gambar 3
Database Repositori Kemdikbud RI (Baru)

Pengembangan konten repositori lembaga, Perpustakaan Kemendikbud fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi perpustakaan khusus milik pemerintah (Tabel 1). Dalam implementasinya, lembaga mengacu pada SNI 7496:2009 tentang Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah, yakni memiliki misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi

perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi lembaga induknya.

Tabel 1
Tugas dan Fungsi
Perpustakaan Kemendikbud Berdasarkan SNI 7496:2009

Tugas	Fungsi
a) Menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas lembaga induknya dalam bentuk penyediaan materi perpustakaan dan akses informasi;	a) Mengembangkan koleksi yang menunjang kinerja lembaga induknya;
b) Mengumpulkan terbitan dari dan tentang lembaga induknya;	b) Menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya;
	c) Menjadi <i>focal point</i> untuk informasi terbitan lembaga induknya;

-
- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> c) Memberikan jasa perpustakaan dan informasi; d) Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang tugas perpustakaan; e) Meningkatkan literasi informasi | <ul style="list-style-type: none"> d) Menjadi pusat referal dalam bidang yang sesuai dengan lembaga induknya; e) Mengorganisasikan dan mendayagunakan materi perpustakaan; f) Menerbitkan literatur sekunder dan tersier dalam bidang lembaga induknya, baik cetak maupun elektronik; g) Melestarikan materi perpustakaan, baik preventif maupun kuratif; h) Melaksanakan digitalisasi materi perpustakaan; i) Menyajikan layanan koleksi digital; j) Menyediakan akses informasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global, dan sebagainya. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
-

Pengembangan repositori lembaga Kemendikbud membutuhkan proses teknis dan manajerial, seperti tahap desain, implementasi, infrastruktur, fungsi dan fitur, perencanaan, penentuan skala prioritas, koordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dan pemangku kepentingan. Penjabaran proses tersebut dijabarkan dalam rencana pengembangan repositori lembaga dan pemanfaatan koleksi digital *local content*, sebagai berikut:

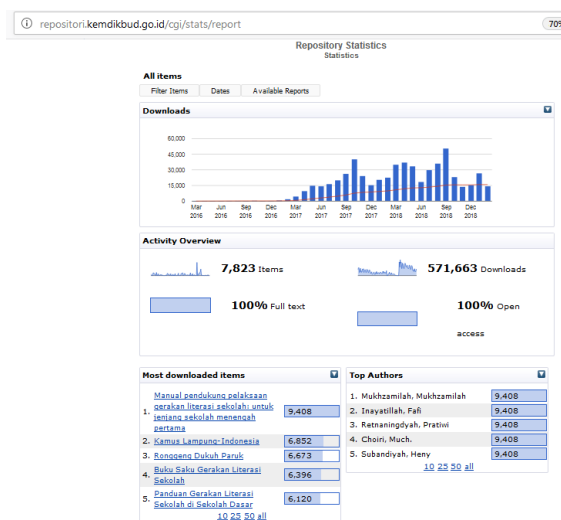
- 1) Pengelolaan dan diseminasi koleksi lokal—suatu proses/kegiatan pengorganisasian informasi dan fisik koleksi mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, evaluasi, serta penyebaran informasi koleksi yang merupakan terbitan/publikasi internal Kemendikbud yang merupakan produk/hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkungan Kemendikbud.
- 2) Pembangunan repositori institusi Perpustakaan Kemendikbud—pembangunan aplikasi terpusat dan terintegrasi sebagai penyimpanan dan preservasi informasi digital *local content* Kemendikbud.
- 3) Optimalisasi akses konten repositori—kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan dan kebudayaan dan sistem

pengelolaan koleksi lokal yang terintegrasi.

Optimalisasi peranan repositori lembaga Perpustakaan Kemendikbud—memberikan informasi pendidikan dan kebudayaan secara akurat, cepat, dan tepat yang dapat di akses dari manapun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

2. Upaya Pengembangan Konten dan Sistem Repositori Lembaga

Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pengawasan dari pemanfaatan repositori lembaga. Giaretta (2011) mengatakan bahwa perlunya otorisasi pengawasan dan hak akses informasi serta validasi objek digital melalui sistem informasi repositori lembaga berdasarkan ketentuan hukum dan sistem yang berlaku. Berdasarkan data statistik pemanfaatan konten repositori lembaga di portal repositori Kemendikbud tahun 2019 (per-15 Februari) diketahui bahwa jumlah koleksi yang diakses dan di-download jumlahnya relatif banyak. Dari sejumlah 7823 judul koleksi (items) yang ada di portal repositori lembaga diketahui ada 571663 judul koleksi yang ter-download dengan sistem akses secara terbuka dan full text (100%). Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4
Statistik pemanfaatan koleksi digital di repositori lembaga Kemendikbud

Pengembangan strategi pemasaran ini bertujuan untuk mempromosikan sumber daya informasi perpustakaan dan pusat informasi. Implementasi strategi ini berupa penyediaan fasilitas membaca, belajar, diskusi, dan riset bagi pengguna. Beberapa prinsip dalam implementasi strategi tersebut, yaitu identifikasi produk informasi/pengetahuan, tarif/harga layanan, tempat akses, promosi/pemasaran, pengguna/peserta, bukti, dan proses fisik. Wujud dari strategi pengembangan konten dan sistem repositori tersebut, diimplementasikan oleh Perpustakaan Kemendikbud melalui berbagai upaya sebagai berikut

1) Upaya internal

- *Workshop*, melalui kegiatan *workshop* repositori lembaga Kemendikbud dengan melibatkan sekretariat unit utama
- Pengembangan dan perawatan sistem repositori lembaga, dengan menambah kapasitas

penyimpanan (*storage*) yang sebelumnya 500 GB menjadi 1 TB.

- Integrasi dengan sistem katalog perpustakaan terintegrasi Kemendikbud di laman <https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/>, sistem ini mengintegrasikan pencarian ke beberapa sumber pengetahuan yang ada di Kemendikbud

2) Upaya eksternal

- Sosialisasi melalui laman dan media sosial Perpustakaan Kemendikbud. Posting mengenai koleksi RI Kemendikbud dan mengadakan quiz di media sosial.

Sosialisasi pada forum-forum perpustakaan, baik perpustakaan khusus, umum, dan sekolah.

3. Produk Pengetahuan *Local Content* Lembaga

Ketentuan koleksi digital local content yang menjadi arsip konten repositori lembaga Kemendikbud, antara

lain: (1) karya intelektual sivitas lembaga; (2) karya tulis bidang pendidikan dan kebudayaan, berupa pedoman, peraturan, hasil penelitian, hasil kajian, karya ilmiah, dan terbitan/publikasi Kemendikbud; (3) karya final (bukan naskah); (4) karya harus dalam bentuk digital (PDF; JPEG, PNG; MP4; MP3); (5) karya berseri/paket karya. Sebagian besar karya tulis/publikasi tersebut merupakan produk pengetahuan dan koleksi local content lembaga Kemendikbud yang telah menjadi kebijakan preservasi digital untuk dikelola melalui portal repositori Kemendikbud.

Berdasarkan laporan tim survei/pemetaan jenis koleksi local content tahun 2016 diketahui bahwa

jenis koleksi lokal Kemendikbud sangat beragam, baik dalam format /media fisik (cetak dan digital) maupun dari segi substansi isi (dokumen kebijakan, materi ajar/diklat, jurnal, hasil penelitian, dsb). Berdasarkan hasil survei pemetaan jenis koleksi local content, diketahui ada perbedaan output produk pengetahuan, perbedaan hasil produk pengetahuan local content sivitas Kemendikbud dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Pemetaan Koleksi *Local Content* di Unit Kerja Kemendikbud

No	Kategori Unit Kerja	Unit Kerja	Koleksi Lokal
1	Unit Utama	Sekretarian, Direktorat, Biro, Pusat	Kebijakan Kemendikbud (Pedoman, Panduan, Juklak, Juknis), Hasil Kajian
2	Unit/Lembaga Diklat	Pusdiklat, LPMP, P4TK, LP2KS	Materi Diklat, Hasil Belajar Peserta Diklat
3	Unit/lembaga Penelitian	Balai Bahasa, Balai Arkeologi, BPPAUD Dikmas, BPCB, BPNP	Hasil Penelitian, Jurnal

4. Strategi Pengolahan Produk Pengetahuan *Local Content* Lembaga

Agar pengelolaan dan diseminasi konten repositori lembaga Kemendikbud sesuai dengan perencanaan pengembangan (lihat Pembahasan 1) maka lembaga perlu menyiapkan berbagai strategi dalam pengelolaan produk digital *local content* yang akan dilayankan melalui repositori lembaga Kemendikbud.

a. Strategi kebijakan pengembangan sistem repositori

Berikut ini beberapa kebijakan yang mengatur tentang pembangunan dan pengembangan repositori lembaga (Kemendikbud, 2016):

- Kebijakan Koleksi, mencakup aspek relevansi, lengkap, mutakhir, terarah, kesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Kriteria seleksi koleksi dalam pengembangan *local content*

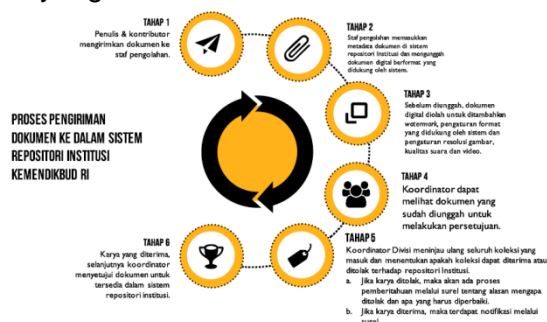
lembaga, yaitu: (a) karya merupakan hasil seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud dan informasi publik yang terkait UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (b) karya berfokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, berupa pedoman, peraturan, hasil penelitian, hasil kajian, karya ilmiah, dan terbitan/publikasi Kemendikbud lainnya; (c) karya yang diunggah dan dapat diakses oleh publik harus bersifat final, jika karya masih berupa draft naskah, dapat disimpan pada perpustakaan digital namun dibatasi hak aksesnya; (d) karya harus dalam bentuk digital dengan format teks (PDF); gambar (JPEG, PNG); video (MP4); audio (MP3); (d) jika karya merupakan bagian dari sebuah karya berseri atau paket karya, sebaiknya disusun dalam sebuah paket karya; dan (e) karya yang ada di perpustakaan digital Kemendikbud bukan untuk tujuan komersial.

- Manajemen Hak, berkaitan dengan hak cipta dan tipe pengguna. Hak cipta suatu karya yang dikelola

dalam Perpustakaan Digital Kemendikbud dimiliki oleh institusi pencipta karya. Terkait dengan perizinan akses (lisensi), lembaga telah menetapkan seluruh materi yang diunggah dalam perpustakaan digital menggunakan lisensi *Creative Common CC-by License*, dan pengguna yang menggunakan sumber informasi tersebut harus menuliskan atribut sumbernya.

- Kebijakan Divisi. Divisi merupakan unit administratif yang melakukan aktivitas penciptaan dokumen, memiliki kepemimpinan tertentu memiliki stabilitas jangka panjang, dan bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan divisi.

Kebijakan Pengiriman. Koleksi yang dikumpulkan dan dikirimkan oleh staf pengolahan ke Perpustakaan Digital Kemendikbud harus mendapat persetujuan dari koordinator divisi dan sesuai dengan kebijakan koleksi Perpustakaan Digital Kemendikbud. lihat Gambar 5.



Gambar 5

Alur pengiriman dokumen ke Perpustakaan Kemendikbud (Kemendikbud, 2016)

- Kebijakan Sistem dan Metadata. Kebijakan sistem mencakup sistem perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), operasional dan perawatan rutin.

Hardware terdiri dari server, scanner, MPEG Card. Software terdiri dari *Eprints*, sistem operasi (*Windows Server/Linux Server*), dan *software* pengolah PDF (*Adobe*

Acrobat Pro). Sedangkan operasional dan perawatan rutin terdiri dari instalasi dan kustomisasi, *upgrade* dan migrasi data, proses digitalisasi dan preservasi, pelatihan staf dan pengembangan keterampilan (*skills*). Kebijakan metadata terkait dengan interoperabilitas dan memilih *Dublin Core* sebagai metadatanya.

- Kebijakan Layanan. Kebijakan layanan ini mencakup: (a) Perpustakaan Digital Kemendikbud tersedia secara *online* dan beroperasi selama 7x24 jam secara berkelanjutan; (b) setiap pengguna yang akan mengunduh koleksi wajib melakukan registrasi pada Perpustakaan Digital Kemendikbud; (c) pengguna dapat meminta bantuan kepada staf jika mengalami masalah dan kesulitan dalam mengoperasikan layanan Perpustakaan Digital Kemendikbud

dengan mengirimkan laporan atau permintaan melalui email ke perpustakaan@kemdikbud.go.id; dan (d) pelanggaran terhadap karya yang telah diunduh oleh pengguna, diluar tanggung jawab pengelola Perpustakaan Digital Kemendikbud.

- Kebijakan Preservasi. Perpustakaan Digital Kemendikbud memastikan karya yang berupa *file* digital yang disimpan dalam pangkalan data tetap dapat digunakan secara berkelanjutan. Perpustakaan Digital Kemendikbud menerapkan kebijakan preservasi digital: (a) menyimpan setiap karya tanpa batasan waktu; (b) memastikan setiap karya tetap dapat dibaca dan diakses serta dilakukan konversi ke format terbaru (jika dianggap perlu); (c) melakukan *backup* data secara

berkala; dan (d) melakukan pengecekan berkala terhadap ketersediaan ruang penyimpanan, penggunaan teknologi, ketersediaan listrik dan lainnya yang dianggap perlu untuk keberlangsungan layanan. Hartati (2011) dan Pamardi (2013) dalam penerapan kebijakan preservasi digital setidaknya mencakup tiga hal, yaitu preservasi teknologi, *back up* data, migrasi dan penyegaran (*refreshing*).

Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas, Perpustakaan Kemendikbud mendapatkan dukungan penuh dari lembaga induknya untuk pengembangan sistem, kuantitas dan kualitas konten lembaga, baik berupa dukungan infrastruktur jaringan (komputer, server, dan internet), SDM (pustakawan dan tenaga pendukung), maupun anggaran pengelolaan sistem repositori dan publikasi lembaga (*local content*). Berbagai kebijakan repositori lembaga Perpustakaan Kemendikbud di atas diharapkan dapat menjadi panduan (*guidelines*) bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas operasional repositori lembaga (Amir & Johan, 2018).

b. Strategi pengembangan produk pengetahuan digital local content

Bahasan ini menjadi poin penting dalam kajian ini, karena koleksi digital *local content* yang tercantum di portal repositori Kemendikbud bersumber dari karya intelektual, kebijakan, pedoman, dan laporan kegiatan sivitas lembaga. Sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan dalam pengembangan dan pemanfaatan produk pengetahuan digital *local content* repositori lembaga, Perpustakaan Kemendikbud perlu merujuk konsep transfer pengetahuan menjadi produk pengetahuan berbasis

domain pengetahuan lembaga sebagaimana yang disampaikan oleh [Denker \(2018\)](#) (lihat Gambar 1). Berdasarkan konsep yang disampaikan [Denker \(2018\)](#), konsep pengembangan produk pengetahuan digital *local content*, dijelaskan sebagai berikut.

Deskripsi Ide Produk Baru

1) Analisis pemangku kepentingan internal dan eksternal: peran dan pengaruhnya

Makna Umum:

Koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan repositori lembaga terdiri dari tim internal (Tim Subbagian Perpustakaan, BKLM) dan tim eksternal (Atasan dan eselon IV, pihak/lembaga eksternal: narasumber/konsultan, Pustekkom dan Perpustakaan Nasional RI). Ditambahkan dari pihak lain terkait dari staf BKLM, pengelola perpustakaan di lingkungan Kemendikbud, pegawai Kemendikbud, dan pemustaka umum sebagai pengguna. Prinsipnya bahwa pemangku kepentingan dan pengguna adalah mitra kerja tim pengembangan sistem repositori lembaga Kemendikbud.

2) Pemetaan jenis koleksi *local content* (Tabel 2)

Makna Umum:

Identifikasi dan pendataan jenis koleksi *local content* repositori lembaga, dan pengembangannya difokuskan pada koleksi digital. Dokumen dievaluasi secara berkala, minimal setiap tahun.

3) Re-evaluasi implementasi kebijakan, sistem repositori, dan pemanfaatan konten repositori lembaga (lihat pembahasan 2 dan 4.1)

Makna Umum:

Kebijakan merupakan salah satu bagian inti dari pengembangan repositori lembaga Kemendikbud. Kebijakan ini harus disusun dengan seksama dan mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan yang ada termasuk perencanaan peningkatan kuantitas dan kualitas konten repositori. Kebijakan implementasi repositori lembaga harus ditetapkan oleh pimpinan lembaga dan harus segera disosialisasikan ke pengguna internal dan eksternal sehingga pemanfaatannya dapat diketahui dan dipahami oleh semua pengguna.

4) Optimasi sivitas lembaga sebagai produsen pengetahuan

Makna Umum:

Pengembangan produk pengetahuan lembaga merupakan suatu kebutuhan informasi intelektual lembaga. Adanya kebijakan lembaga terkait pengembangan koleksi digital *local content* ini menjadi aset dan modal bagi sivitas lembaga untuk menghasilkan karya-karya intelektual dan dokumen lembaga (lihat Tabel 2). Pustakawan sebagai motor penggerak perpustakaan dituntut sebagai produsen pengetahuan yang memberikan inspirasi dan motivasi bagi sivitas lainnya di lingkungan Kemendikbud. Dalam memproduksi pengetahuan, pustakawan dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan sivitas lain, baik dalam kegiatan penelitian, kajian, dan penyusunan dokumen kebijakan dan modul pengajaran/pelatihan.

Dalam implementasi konsep transfer pengetahuan yang hasilnya berupa produk pengetahuan, [Anna & Puspitasari \(2013\)](#) mengatakan bahwa pekerja pengetahuan perlu menyiapkan

strategi dalam penciptaan produk pengetahuan dan layanan organisasi karena ia bertanggung jawab atas penciptaan dan pertumbuhan inovasi pengetahuan.

Strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara: (a) penyediaan koleksi digital *local content* melalui portal perpustakaan digital dan repositori lembaga; dan (c) kegiatan riset dan pengembangan untuk menghasilkan produk pengetahuan berkualitas dan mutakhir.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: (1) pengelolaan repositori lembaga Kemendikbud mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan dan koleksi perpustakaan, khususnya koleksi *local content*; (2) konten koleksi

digital *local content* di portal repositori lembaga Kemendikbud jumlahnya relatif banyak dan pemanfaatannya sudah optimal, namun lembaga perlu menerapkan strategi pemasaran/promosi yang tepat ke pengguna/masyarakat; (3) fokus pengembangan produk pengetahuan *local content* repositori lembaga Kemendikbud adalah bidang pendidikan dan kebudayaan, dalam bentuk dokumen kebijakan Kemendikbud (pedoman, panduan, juklak, juknis), hasil kajian, materi diklat, hasil belajar peserta diklat, hasil penelitian, dan jurnal; dan (4) lembaga (Perpustakaan Kemendikbud) perlu menetapkan strategi pengembangan sistem dan konten repositori yang mencakup strategi kebijakan pengembangan sistem repositori hingga ke pengembangan produk pengetahuan dan koleksi digital *local content* repositori lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, B. E. (2005). Menjadikan Manajemen Pengetahuan Sebagai Keunggulan Kompetitif Perusahaan Melalui Strategi Berbasis Pengetahuan. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi (JSMO)*, 2(Nomor 1), 58-68.
- Amir, C & Johan, R.C. (2018). Diseminasi Koleksi Lokal: Design Development Research Pembangunan Repositori Institusi Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Visi Pustaka*, 20, (Nomor 3), np.
- Amir, C. (2016). Optimalisasi pengelolaan dan diseminasi koleksi lokal melalui pembangunan repositori institusi perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016. Dokumen Rancangan Proyek Perubahan (RPP) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 2. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud RI.
- Anna, N. E. V & Puspitasari, D. (2013). Knowledge sharing in libraries: A case study of knowledge sharing strategies in Indonesian University Libraries. *IFLA WILIC 2018*, Singapore.
- Arianto, M. S., Zulaikha, S. R., & Zain, L. (2017). Implementasi pengelolaan digital institutional repository pada perpustakaan-perpustakaan PTKIN dan dampaknya terhadap pemerinkatan di webometrics1.

- Cassella, M. (2010). Institutional repositories: an internal and external perspective on the value of IRs for researchers' communities. *Liber quarterly*, 20(2), 210-225.
- Denker, F. (2018). The Crucial Role of Domain Knowledge in Evaluating Early-Stage New Product Ideas. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Ezema, I. J. (2013). Local contents and the development of open access institutional repositories in Nigeria university libraries: Challenges, strategies and scholarly implications. *Library Hi Tech*, 31(2), 323-340.
- Giaretta, D. (2011). Advanced digital preservation. Springer Science & Business Media.
- Hartati. (2011). Preservasi digital di perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Havard Library University. (2012). Knowledge and library services strategy documents – University of Mumbai. Pre-readings for July 31, Session at Harvard Business School. Di <http://www.hbs.edu/about/docs/priorities-fpo-cmyk-120203.pdf>. (akses 12 Februari 2019).
- Jones, C. (2007). Institutional repositories: content and culture in an open access environment. Elsevier.
- Kemendikbud. (2016). Kebijakan Perpustakaan Digital. Jakarta.
- Khan, M. (2005). Estimating the level of investment in knowledge across the OECD countries. In *Intellectual Capital for Communities* (pp. 37-59). Butterworth-Heinemann.
- Mafar, F. (2012). Isu-isu strategi pembangunan perpustakaan digital. *Jurnal Visi Pustaka*, 14(1).
- Materska, K. (2004). Librarians in the knowledge age. *New Library World*, 105(3/4), 142-148.
- Mukhlis, M. (2017). Eksplorasi Model Pengembangan Perpustakaan Digital di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014-2015. *LIBRIA*, 8(1).
- Nashihuddin, W. (2009). Pengelolaan Koleksi Digital Menurut Undang-Undang Hak Cipta (Studi Analisis di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Perpustakaan*.
- Nurkamilah, S. (2012). Implementasi perpustakaan digital (studi komparasi antar perpustakaan universitas negeri di Yogyakarta), (Tesis). *Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Perpustakaan*.
- Pamardi, A. P. H. (2013). *Preservasi Digital Koleksi Tugas Akhir di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Saputro, B.I. & Chaidir A. (2018). Kompetensi pustakawan perpustakaan khusus: studi kasus di perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *BACA: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 39 (2).
- Sutedjo, M. (2014). Pengelolaan Repositori Perguruan Tinggi dan Pengembangan Repositori Karya seni. In *Seminar Nasional Digital Local Content: Strategi Membangun Repository Karya Seni*.
- Yaniasih. (2015). Analisis dan desain konseptual repositori institusi yang mendukung swarsip peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (Tesis). *Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor*.